

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.⁵ Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.⁶ Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amana yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁷

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

⁵ Solihat, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan (Jakarta. Jurnal Ekonomi Bisnis, 2009), h. 135–149

⁶ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 134.

- a. adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah
- b. Adanya standar kinerja, disetiap insitusi yang diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Terciptanya tanggung jawab dan rasa kepercayaan publik pada lembaga pendidikan, maka masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga sekolah atau madrasah yang dianggap sebagai sumber perubahan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban manajemen sekolah.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.⁸

⁸ Slamet, PH, Handout Kapita Selektu Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI, 2005), h. 47.

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi telah mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, maka akan dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif.⁹ Efektivitas sebagai suatu ketetapan tindakan atau kesempurnaan hasil suatu pekerjaan.¹⁰ Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan salah satu hal yang paling signifikan dalam menetapkan prioritas pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara dalam ketersediaan sumber daya yang terbatas bagi pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di kemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan,

⁹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: Andi, 2009), h.113.

¹⁰ Soewartoyo, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 25.

ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan demikian, efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Thomas melihat efektivitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas, berdasarkan tiga dimensi berikut ini:

Pertama, *The administrator production function* : fungsi ini meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan baik layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Kedua, *The psychologist's production function* : fungsi ini melihat produktivitas dari segi keluaran, perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik, dengan melihat nilai-nilai yang di peroleh peserta didik sebagai suatu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode belajar tertentu di sekolah.

Ketiga, *The economic's production function* : fungsi ini melihat produktivitas sekolah ditinjau dari segi keluaran ekonomi yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan sekolah. Hal ini mencakup “harga” layanan yang diberikan (pengorbanan atau cost) dan “perolehan” (earning) yang ditimbulkan oleh layanan itu atau di sebut “peningkatan nilai baik”.¹¹

¹¹ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007)

Berdasarkan berbagai pendapat tentang keefektifan sekolah, tampaknya persoalan mutu masih dipersepsi secara berbeda oleh para pakar, bergantung sudut pandang dan bidang ilmu yang dipakai untuk mengkajinya. Namun demikian salah satu indikator penting tujuan pendidikan yang banyak disepakati adalah tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran yang berupa prestasi belajar siswa yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur keefektifan sekolah.¹²

C. Pengelolaan Keuangan Madrasah

1. Pengertian pengelolaan keuangan

Menurut Sri Minarti, “Pengelolaan ataupun manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.”¹³

Pengelolaan keuangan menurut Depdiknas bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan,

¹²Anwar Sewang, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Wineka Media Belajar Sepanjang Hayat 2015)

¹³ Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 213.

pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.¹⁴

Menurut Lilik Huriyah, manajemen keuangan pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan dan mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan secara sistematis dan strategis.¹⁵

Darsono mengatakan bahwa, “Manajemen Keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi.”¹⁶ Lebih lanjut Mulyono mendefinisikan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.¹⁷

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional,. *Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah.* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, 2002) 88.

¹⁵ Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan*, 4.

¹⁶ Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2009)h. 1

¹⁷ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 181.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala aktifitas dalam mengatur keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan madrasah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan madrasah.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.¹⁸

Keuangan nampaknya mempunyai peran yang signifikan dalam suatu lembaga apapun, khususnya lembaga pendidikan. Mujamil Qomar mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada keuangan, yaitu : Pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan menjadi gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. kedua, lazimnya keuangan itu sulit sekali didapatkan dalam jumlah yang besar

¹⁸ M. Qomar. Manajemen Pendidikan Islam Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. (Jakarta: Penerbit Erlangga,2008) h 150-151

khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.¹⁹

Manajemen keuangan di sekolah atau madrasah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

2. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah peran manajemen sekolah atau komite sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan manajemen ini diharapkan kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya,

¹⁹ Ibid, h 151

dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kadarman tujuan manajemen keuangan adalah: ²⁰

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kreativitas dan inovasi komponen lembaga pendidikan dalam menggali sumber daya, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pembukuan keuangan yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Tahap-tahap manajemen keuangan

Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan, dan evaluasi. Jones mengemukakan *financial planning is called budgeting* merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat

²⁰ Kadarman. Pengantar ilmu manajemen. (Probolinggo : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992) h 18

dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.

Menurut Thomas. H. Jones, manajemen memiliki tiga tahapan penting .yang jika di terapkan dalam pengelolaan keuangan akan ditemukan sinkronisasi, yaitu :²¹

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan dengan memilih alternatif – alternatif terbaik. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Menurut Terry sebagaimana dikutip oleh Syarifudin mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan

²¹ Tim dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, Bandung; Alfabeta, 2009, hlm. 257

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.²²

Bintoro Tjokroaminoto menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.²³ Prajudi Atmosudirjo juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.²⁴

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah dan langkah terbaik untuk mencapainya.

Menurut Fayol perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.²⁵ Perencanaan merupakan fungsi utama dan terpenting dalam

²² Syarifudin. *Administrasi Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung : Pustaka. Setia, 2005) h 14

²³ Husain Usman. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 35

²⁴ *Ibid*, h 36

²⁵ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2020).h 77

manajemen, karena tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak dapat berjalan. Pada manajemen keuangan juga memperhatikan fungsi perencanaan.

Perencanaan anggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²⁶

Perencanaan anggaran disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahun, sedangkan pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan untuk bisa mencapai *goals* atau tujuan yang diinginkan.²⁷

Penyusunan anggaran merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang bisa diketahui bersama serta penentuan kisaran biaya untuk setiap program kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga

²⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan* (Bandung: Rodsa Karya, 2009), 80.

²⁷ Abdul Halim, *Mengelola Bos Dengan Baik* (Jakarta: Pt. Pustaka Setia, 2018), 21.

sebagai alat bantu bagi manajemen lembaga pendidikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Dengan demikian, anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan madrasah. Maka seorang penanggung jawab program kegiatan di madrasah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

Menurut Sri Minarti, perencanaan anggaran sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.²⁸ Edy menjelaskan, Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu lembaga selama periode tertentu di masa yang akan datang.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan faktor penting dalam menetapkan tujuan yang telah direncanakan sehingga pihak manajemen dapat merealisasikan harapan-harapannya dan merencanakan anggaran

²⁸ Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 229.

²⁹ Edy Sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 169.

sekolah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sekolah dengan efektif dan efisien.

Dalam perencanaan anggaran menurut Thomas, H. Jones terdapat beberapa langkah yakni :

1) Langkah menyusun perencanaan pengelolaan keuangan madrasah

Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menurut Rosdiana sebagai berikut³⁰:

- a) Menginventaris rencana yang akan dilakukan
- b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas
- c) Menentukan program kerja dan rincian program
- d) Menghitung dana yang dibutuhkan
- e) Menentukan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan rencana.

RAPBM yang sudah disusun tersebut kemudian dibahas dengan pengurus dan komite sekolah. Penyusunan RAPBM harus melibatkan kepala madrasah, guru, bendahara, komite madrasah, dan Kepala Tata Usaha. RAPBM perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan madrasah secara optimal.

Setelah disetujui maka selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Pada setiap anggaran yang disusun, perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan

³⁰ Ibid, h 170

dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.³¹

Menurut Luneto, ada 4 langkah dasar dalam perencanaan keuangan:

- a) menetapkan tujuan,
- b) merumuskan keadaan saat ini,
- c) mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan.
- d) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan yang meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.³²

2) Prinsip Penyusunan RAPBM

Prinsip-prinsip dalam penyusunan RAPBM menurut Mustari yang dikutip oleh Zahrudin adalah:

- a) RAPBM harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran siswa secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.
- b) RAPBM harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.

³¹ Ibid, h 171

³² Susilawaty, Cut Zahri Harun , Khairuddin, Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Di Sd Negeri 4 Kota Banda Aceh, jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 1, No. 2, (November :2012) hal 38

c) Dalam menyusun RAPBM, madrasah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan madrasah.

Sedangkan menurut Manahan Tampubolon, prinsip penyusunan RAPBS, antara lain: RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab dan transparan, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah, serta dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.³³

3) Sumber Keuangan Madrasah

Sumber-sumber keuangan madrasah menurut Rusdiana dapat bersumber dari: orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni. Pemerintah merupakan penanggung dana terbesar di antara yang lain (sekitar 70%). Selanjutnya orangtua murid (10-24%), masyarakat (sekitar 5%), dan yang terakhir pihak lain, baik berbentuk hibah maupun pinjaman.³⁴

Anggaran pendapatan pada suatu madrasah menurut Yusuf dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber, yaitu:

³³ Manahan Tampubolon, , h.233

³⁴ Nurhidayah, Penganggaran Keuangan Madrasah, Jurnal Islamic Education Manajemen 4 (2019): 133–146.

a) Dana dari Pemerintah Baik dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya. Dan dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.

b) Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :

- Dana tetap tiap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
- Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur)
- Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

c) Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari

kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.³⁵

d) Dana dari Alumni

Dana ini merupakan bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah yang tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

e) Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

f) Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

³⁵ Ibid, hlm.133-146

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.³⁶

2. Pelaksanaan (*Actuating*) Anggaran

Actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi actuating adalah usaha menggerakkan seluruh anggota yang terkait, untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar.

Setelah perencanaan anggaran telah dibuat, selanjutnya adalah realisasi anggaran tersebut dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan keuangan merupakan penatausahaan keuangan yang mencakup pengurusan operasional dan administrasi, tata cara pembukuan dan pelaporan (pertanggungjawaban) keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah memiliki tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan dana madrasah, mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah, memberikan informasi yang akurat, serta memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta pelaporannya.³⁷

³⁶ Akdon Dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: Rodsa Karya, 2015). 86

³⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.136.

Keefektifan dalam pengorganisasian sekolah menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, dan menentukan personel (guru dan non guru) melaksanakan tugasnya. Sedangkan keunggulan dalam pengorganisasian menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah.

Selanjutnya Abid Zulfikar menjelaskan bahwa pelaksanaan pengeluaran dana pendidikan dalam biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi dalam satuan pendidikan berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.³⁸ Abid Zulfikar juga menjelaskan bahwa ada 3 tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan keuangan madrasah

³⁸ M. Abid Dzulfikar, —Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Sma Negeri Se- Kabupaten Kendall (Semarang, 2015), h. 110.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBM supaya mekanisme yang ditempuh secara benar, efektif, dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran dana pendidikan dalam biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.³⁹

Kemudian, juga dijelaskan bahwa biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi dalam satuan pendidikan berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang

³⁹ M. Abid Dzulfikar, *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMAN Se-Kabupaten Kendal*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 35.

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RAPBS. Dalam kaitannya dengan realisasi anggaran, sekolah memerlukan pembukuan keuangan sekolah untuk membantu pelaporan keuangan sekolah.⁴⁰

Menurut Manahan Tampubolon, Pelaksanaan anggaran belanja mengacu pada anggaran kegiatan yang tertuang pada RAPBS. Penggunaan mata anggaran kegiatan antara lain:⁴¹

- a) Kebutuhan rumah tangga sekolah
- b) Kesiswaan
- c) Kurikulum
- d) Sarana prasarana
- e) Humas (Hubungan Masyarakat)
- f) Ketatausahaan
- g) Badan penilaian pendidikan
- h) Badan penelitian dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan PHBA/PHBN (Peringatan Hari Besar Keagamaan/Peringatan Hari Besar Nasional), dan lain-lain.

⁴⁰ Ibid., h. 37.

⁴¹ Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.168

- i) Pemberian honor pada GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RAPBM. Dalam kaitannya dengan realisasi anggaran, sekolah memerlukan pembukuan keuangan sekolah untuk membantu pelaporan keuangan sekolah.⁴²

- 2) Efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah

Dalam pelaksanaan manajemen atau pengelolaan keuangan, sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan keefektifan penggunaan dana, yaitu:

- a) Transparansi berarti keterbukaan, yaitu dalam bidang manajemen keterbukaan terhadap melakukan suatu program atau kegiatan. Dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan keterbukaan dalam manajemen keuangan untuk mengetahui sumber pendapat, penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya.⁴³
- b) Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain karena hasil kerjanya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ada tiga pilar utama dalam menciptakan akuntabilitas, yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah

⁴² Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.6

⁴³ Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),h 190

dengan menerima masukan dan mengikutsertakan komponen sekolah dalam mengelola kegiatan, standar kerja yang dapat diukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

- c) Efektifitas adalah penyacapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam manajemen keuangan dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiaya aktivitas sesuai tujuan lembaga dengan keluaran yang diharapkan.
- d) Efisiensi berkaitan dengan kuantitas dari hasil kegiatan yang dilaksanakan. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran yang meliputi dana, daya, dan waktu. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, dan hasil.

Sedangkan Wijaya menyatakan bahwa, keefektifan penggunaan dana berpedoman pada prinsip pengelolaan dana pendidikan yang terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pengelolaan meliputi keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas.

- a) Keadilan berarti besarnya dana pendidikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b) Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, biaya) dengan hasil.
- c) Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah.

d) Akuntabilitas berarti penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan.

Lebih lanjut Wijaya menjelaskan prinsip khusus pengelolaan keuangan meliputi efektivitas, kecukupan, dan berkelanjutan.⁴⁴

a) Efektivitas diterapkan pada kepala sekolah untuk dapat mengatur keuangan dan membiaya aktivitas sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

b) Kecukupan berarti pendanaan pendidikan mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

c) Berkelanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keefektifan pelaksanaan pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan meliputi prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keadilan merupakan dana yang ada disesuaikan dengan tujuan pencapaian kegiatan pendidikan, efisiensi merupakan penetapan masukan dan keluaran sumber dana ataupun sumber daya yang telah dikorbankan, efektivitas merupakan

⁴⁴ David Wijaya. Manajemen Keuangan : Konsep dan penerapannya. (Jakarta : Grasindo, 2017), h 54

penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan, transparansi merupakan keterbukaan sumber dana yang telah diperoleh, dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban melalui laporan keuangan yang dibuat oleh sekolah.

3) Pembukuan Keuangan Sekolah

Dalam proses pembelanjaan dana sekolah harus mengacu pada peraturan-peraturan maupun Petunjuk Teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan ketentuan pemberi dana dan sekolah. Selain memperhatikan petunjuk teknis, dalam pelaksanaan keuangan juga perlu memperhatikan pembukuan. Pembukuan adalah sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan diisi dalam bentuk laporan. Sehingga nantinya semua penerimaan dan pengeluaran akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang baku.

Pembukuan bisa didefinisikan adalah pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh madrasah. Tata cara pembukuan harus dikuasai oleh bendahrawan. Yang dimaksud sebagai bendahara adalah seperti yang dikutip oleh Azizah dalam pasal 77 ayat (1) ICW yang dimaksud bendahara adalah orang-orang atau badan-badan yang karena Negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang, atau kertas-kertas berharga dan barang-barang di dalam gudang-gudang atau tempat-tempat penyimpanan yang lain, dan pelaku demikian diwajibkan

memberi perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁵

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan dilakukan oleh bendaharawan yang mengelola dana tersebut dan dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), dan Buku Pembantu Pajak.⁴⁶ Dalam proses pelaksanaan keuangan, pembukuan menjadi hal yang diwajibkan guna menjaga transparansi penggunaan keuangan. Pembukuan keuangan biasa dikenal dengan istilah akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan.

Pembukuan keuangan sekolah atau yang lebih dikenal dengan penyelenggaraan akuntansi pendidikan bertujuan untuk menyediakan gambaran keuangan pada keseluruhan penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari empat laporan yaitu:⁴⁷

- a) Laporan neraca yang berisikan data tentang aset, utang, dan modal.
- b) Laporan surplus defisit yang berisikan data tentang pendapatan, biaya, surplus atau defisit.
- c) Laporan arus kas yang berisikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan

⁴⁵ Azizah, Manajemen Keuangan, Azizah'sdreams.Blogspot.Com, 2015, 7

⁴⁶ Kementerian Agama, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Ra Dan Madrasah Ta 2021.

⁴⁷ Partono Thomas, Dasar Manajemen Keuangan, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 17

d) Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja sekolah harus melaksanakan manajemen keuangan sekolah dengan mengacu pada rencana APBS. Sekolah juga memerlukan suatu sistem akuntansi yang disesuaikan dengan entitas pendidikan dalam rangka menyediakan gambaran keuangan sekolah. Gambaran keuangan yang berupa laporan keuangan sekolah perlu untuk dianalisis sebagai cara dalam membaca laporan keuangan sekolah.

3. Pengawasan dan pelaporan (*controlling*)

Sondang P Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer (pimpinan) yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil yang dikehendaki.⁴⁸

George. R Terry, dengan tegas mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakantindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁹

⁴⁸ Sondang P.Siagian. Filsafat Administrasi, (Jakarta: CV. Gunung Agung, 2005), h 14

⁴⁹ George R. Terry. Prinsip-Prinsip Manajemen.(Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006), h 395

Sementara Sarwoto , mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁵⁰

Menurut Bafadal pengawasan merupakan merupakan proses memantau berbagai program lembaga. Tujuannya untuk menetapkan tujuan yang dapat diwujudkan secara nyata dan memperbaiki semua penyimpangan.⁵¹

Dengan memperhatikan definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan yang diadakan untuk menjamin atau membuat sedemikian rupa agar pelaksanaan pekerjaan itu dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam perencanaan.

Setelah diadakannya pengawasan, selanjutnya tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha

⁵⁰ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981), hlm. 93

⁵¹ Machmud Sugandi, Pola Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri".Jurnal Teknologi dan Kejuruan.2010, hal. 129-140.

mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting, agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

Menurut Sri Minarti, dalam pengawasan dan pelaporan manajemen keuangan sekolah ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:⁵²

1) Proses pengawasan pengelolaan keuangan

Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.⁵³

Pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.

⁵² Sri Minarti, manajemen sekolah mengelola lembaga pendidikan secara mandiri. (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011) h 20

⁵³ Sulistyorini, 2006: 136).

T. Hani Handoko menyatakan bahwa terdapat tiga tipe dasar pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik.⁵⁴

- a) Pengawasan Pendahuluan, pengawasan pendahuluan ini dapat diterapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan menyimpang dari tujuan awal.
- b) Pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, disaat melihat penyimpangan terjadi maka pihak sekolah langsung berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- c) Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan penganggaran yang telah dilaksanakan.⁵⁵

Pada proses pengawasan paada dasarnya tidak mencari-cari kesalahan, yang berarti tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan

⁵⁴ Irham Fahmi. Analisa Kinerja Keuangan.(Bandung : Alfabeta,2014), h 98

⁵⁵ Desi, Diyah Parwita, Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Kasus SMP Negeri di Kabupaten Banyumas),Thesis, (Program Study Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2008), hal. 40.

supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya serta menemukan bagaimana memperbaikinya.

Dalam kegiatan pengawasan keuangan madrasah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Ulbert Silalahi, yaitu:

- a) Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan
- b) Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan strategis
- c) Dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan pada penilaian yang objektif
- d) Pencatatan dan pelaporan yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan
- e) Orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang;
- f) Sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan
- g) Melakukan pencegahan secara tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan.⁵⁶

2) Pihak yang teribat dalam pengawasan

Para pihak yang dalam hal ini sebagai pengawas dalam pengelolaan dana pendidikan seperti pada pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 17

⁵⁶ M. Abid Dzulfikar, Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri SeKabupaten Kendal, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hal.35.

Tahun 2010 ada 3 pihak yaitu Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah. Pengawasan pihak internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri yaitu kepala sekolah dan pihak komite sekolah yang ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah. Komite sekolah bersifat independen yang bertujuan mengawasi jalannya program-program pendidikan dari sekolah dan pelaksanaan peningkatan kualitas belajar mengajar sesuai dengan RAPBS. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pihak dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam hal pengawasan hanya menerima laporan dari setiap sekolah mengenai program-program yang akan dijalankan sekolah dalam satu tahun kedepan.⁵⁷

3) Fungsi Pengawasan Keuangan

Fungsi Pengawasan Keuangan menurut Baridwan, Menyatakan bahwa fungsi pengawasan keuangan yaitu:⁵⁸

- a) Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan keuangan yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi.
- b) Untuk penentuan batas-batas mutlak suatu pekerjaan mana yang harus dikerjakan dan mana yang merupakan pelanggaran.
- c) Memberi keyakinan terhadap catatan keuangan dan transaksi.

⁵⁷

⁵⁸ Zaki Baridwan. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. (Yogyakarta: BPFE, 2005), h 52

- d) Mewujudkan keadaan-keadaan yang luar biasa. Ini nampak dalam pembuatan laporan bilamana terjadi penyelewengan dari standar kerja yang dapat diketahui.
- e) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional supaya berjalan lancar, efektif dan efisien.
- f) Membantu manajemen dalam memberi penilaian atas hasil pelaksanaan operasional, membuat peramal atau dugaan serta membantu dalam hal pengambilan keputusan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pengawasan keuangan sangat luas, baik administratif maupun akutansi, tetapi bukan berarti tidak ada lagi peluang bagi orang-orang tertentu pada suatu organisasi untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan serta kesalahan. Dengan adanya pengawasan keuangan pelaksanaan kegiatan penyelewengan atau kecurangan serta kesalahan yang merugikan bisa dikurangi atau diminimalisir. Fungsi pengawasan keuangan adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan dengan tujuan perencanaan menyusun sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan serta mengukur penyimpangan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada 4 (empat) langkah pokok yang terkandung dalam fungsi pengawasan keuangan, yaitu:⁵⁹

- a) Penentuan standar dan metode pengukuran kegiatan Seperti penentuan target penyelesaian tugas pada proses pembayaran, pencatatan, dan sebagainya.
- b) Mengukur kegiatan yang dilakukan Ini tergantung dari jenis kegiatan yang diukur atau standar yang ditentukan.
- c) Membandingkan antara kegiatan dengan standar-standar dan menginterpretasikan penyimpangan bila ada.
- d) Melakukan tindakan koreksi.⁶⁰

⁵⁹ Rahayu Relawati. Dasar Manajemen. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), h 111

⁶⁰ Ibid, h 112